

## EVALUASI PEMANFAATAN RUANG DAN STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TOLITOLI

Zubair Butudoka \*

### Abstract

*Deviation tendency of the spatial planning which have been specified can be caused by some factors, either by spatial planning product or implementation step. Monitoring and evaluate to spatial planning product which there have very needed to to see whether the product of spatial planning as according to its exploiting, or have been happened by the deviation. Through method of survey and data mapping mustered, processed, and analysed to monitoring the level of deviation that happened between condition of reality and plan which have been compiled at product RTRW. Monitoring focused at exploiting of space and space structure. Result of monitoring and evaluation show the existence of deviation which significant so that product of existing RTRW Regency Tolitoli require to be revised.*

**Keywords:** RTRW, Regency Tolitoli

### Abstrak

Kecenderungan penyimpangan terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik produk tata ruang maupun pada tahapan implementasi. Pemantauan dan evaluasi terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada sangat diperlukan untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan. Melalui metode survey dan pemetaan data dihimpun, diolah, dan dianalisis untuk memantau besarnya penyimpangan yang terjadi antara kondisi realitas dan rencana yang telah disusun pada produk RTRW pada lokasi pemantauan. Pemantauan dititikberatkan pada pemanfaatan ruang dan struktur ruang. Hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan sehingga produk RTRW Kabupaten Tolitoli yang ada perlu direvisi.

**Kata kunci:** RTRW, Kabupaten Tolitoli

### 1. Pendahuluan

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Untuk itu diperlukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992 bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, kesesuaian

pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Penataan Ruang menggariskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya struktur ruang selayaknya sesuai dengan rencana tata ruang.

Berbagai kendala Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota diantaranya

---

\* Staf Pengajar Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

disebabkan oleh faktor; teknik operasional, administratif dan tuntutan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun. Oleh sebab itu sangat dirasakan pentingnya suatu kegiatan evaluasi terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada untuk melihat apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan.

Kegiatan evaluasi ini lebih ditekankan pada kegiatan pemantauan penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan amanat yang ditegaskan dalam Undang Undang Penataan Ruang No. 24 tahun 1992.

## 2. Tinjauan Pustaka

Menurut geografi regional ruang, dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya serta lapisan udara di atasnya (jayadinata, 1999). Lebih lanjut dikemukakan bahwa suatu wilayah (region) dalam pengertian geografi, merupakan kesatuan alam, yaitu alam yang serba sama, atau homogen, atau seragam (uniform), dan kesatuam manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaannya yang serba sama yang mempunyai ciri (kekhususan) yang khas, sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah yang lain.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia 1992 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan

melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedang penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Disebutkan pula bahwa pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Dalam kaitannya dengan penataan ruang dan kedudukan Pemerintah Daerah dapat dilihat bahwa dengan diundangkannya UU no.22 dan 25 1999 dan PP.15 tahun 2000 tentang pemerintahan daerah yang terkait dengan otonomi membuat undang-undang yang sebelumnya menjadi tidak begitu relevan termasuk UU.No 24/1992 tentang Penataan Ruang dan no.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Silas (2001) yang belum difahami dengan benar dan baik adalah dasar penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup harus mau atau tidak melibatkan masyarakat luas, sedalam dan sedini mungkin sebagai petaruh (stakeholder) utama.

Melalui kegiatan pemantauan penyimpangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Tolitoli dapat dilihat ada tidaknya/besar kecilnya temuan penyimpangan yang terjadi antara rencana yang telah dibuat melalui produk RTRW yang ada saai ini dengan kondisi riil di lapangan terhadap masing-masing pemanfaatan dan struktur ruangnya, sesuai dengan arahan Buku Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang (BP3R) di Daerah.

## 3. Metode Penelitian

Kegiatan pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode "Survei" dan "Pemetaan" dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

a. Setelah persiapan awal prasurvey, selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan-bahan pemantauan dan evaluasi berupa produk rencana

- tata ruang di masing-masing lokasi serta data-data sekunder lainnya;
- b. Melakukan survei lapangan di masing-masing lokasi pemantauan dan evaluasi melalui lembar tabulasi pendataan primer untuk melihat kondisi realitas terhadap pemanfaatan dan struktur ruang yang ada saat ini (tahun pemantauan);
  - c. Selain menggunakan lembar tabulasi untuk mendapatkan nilai kuantitatif rencana yang ada, pelaksanaan survei lapangan juga menggunakan peta-peta dasar rencana yang telah ada untuk memantau keberadaan pemanfaatan ruang dan letak prasarana dan sarana sebagai wujud dari struktur ruang;
  - d. Selanjutnya, hasil survei lapangan ini kemudian dihimpun, diolah, dan dianalisis untuk memantau besarnya penyimpangan yang terjadi antara kondisi realitas dan rencana yang telah disusun pada produk RTRW di masing-masing lokasi pemantauan; pada bagian akhir adalah kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Hasil pemantauan pemanfaatan ruang

###### ▪ Pemanfaatan peruntukan kegiatan

###### A. Kawasan lindung

Penetapan Kawasan Lindung di wilayah Kabupaten Tolitoli, sebagaimana yang telah diuraikan pada produk Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli Tahun 2001 – 2011, yang didasarkan pada kriteria pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung dan analisis kesesuaian lahan serta mengacu pada Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, telah menetapkan bahwa wilayah Kabupaten Tolitoli yang masuk dalam kriteria kawasan lindung mempunyai luas 113.721,10 Ha atau sekitar 27,87% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tolitoli.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap revisi rencana pemanfaatan ruang bagi peruntukan kegiatan Kawasan Lindung dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya tidak ditemukan adanya penyimpangan yang sangat signifikan, baik terhadap luas, lokasi, maupun fungsi dan jenis peruntukannya. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peruntukan kegiatan Kawasan Lindung dan pemanfaatannya di wilayah Kabupaten Tolitoli masih sesuai dengan hasil revisi RTRW yang ada. Kendala yang terjadi hanyalah terkait dengan upaya pengendalian dan pengembangan kawasan lindung yang telah ditetapkan tersebut.

###### B. Kawasan Budidaya

Perkembangan pemanfaatan ruang kawasan budidaya menunjukkan adanya konflik antar sektor/kegiatan dan konflik kawasan lindung sebelum dilakukan revisi terhadap produk RTRW Kabupaten Tolitoli, sehingga pengembangan kawasan budidaya, setelah dilakukan revisi terhadap produk RTRW Kabupaten Tolitoli pada tahun 2000 yang dipantau saat ini, diarahkan pada penataan kembali pemanfaatan kawasan sesuai dengan potensi sumber daya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terhadap revisi rencana pemanfaatan ruang bagi peruntukan kegiatan Kawasan Budidaya dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya tidak ditemukan adanya penyimpangan yang sangat signifikan, baik terhadap lokasi, fungsi dan jenis peruntukan, maupun arah pengembangannya. Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa peruntukan kegiatan Kawasan Budidaya dan pemanfaatannya di wilayah Kabupaten Tolitoli masih sesuai dengan hasil revisi RTRW yang ada. Kendala yang terjadi hanyalah terkait dengan upaya pengendalian dan pengembangan kawasan budidaya yang telah ditetapkan tersebut, seperti

juga halnya dengan kondisi kawasan lindungnya.

▪ Pemantauan penggunaan lahan

Berdasarkan hasil data survey lapangan tahun 2004 (tabel 1) terhadap penggunaan lahan di daerah Kabupaten Tolitoli yang dibandingkan dengan hasil RTRW Kabupaten Tolitoli dalam kurun waktu tahun 2001 – 2004 menunjukkan adanya penyimpangan yang cukup signifikan, terutama bila dilihat dari fungsi penggunaan lahan untuk kawasan pertanian dengan penyimpangan sebesar 47,41%, kawasan permukiman dengan penyimpangan sebesar 38,60% dan penggunaan lahan untuk alang-alang dengan penyimpangan sebesar 36,11%. Namun, dari segi kesesuaian pemanfaatan ruang pada dasarnya masih sesuai dengan peruntukannya hanya dari segi luasan penggunaannya yang terjadi penyimpangan.

Secara keseluruhan besarnya penyimpangan pada penggunaan lahan adalah **28,47%**. Hal ini bila dikaitkan dengan petunjuk Menteri Departemen Dalam Negeri R.I. No. 850/803/Bangda Tentang petunjuk teknis penyusunan dan evaluasi rencana kota tahun 1993/1994, maka produk RTRW Kabupaten Tolitoli ini perlu dilakukan revisi sebahagian yang terkait dengan penggunaan lahan tersebut.

4.2 Hasil pemantauan Struktur ruang

- Sistem kota /pusat pelayanan

Sesuai dengan arahan pada RTRW Kabupaten Tolitoli tahun 2001-2004 penentuan hirarki perkotaan di daerah Kabupaten Tolitoli didasari pada acuan kelengkapan fasilitas yang meliputi fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan yang mewakili fungsi pusat pelayanan.

Berdasarkan kondisi faktualnya beberapa bagian wilayah Kabupaten Tolitoli secara ekonomi ada yang berorientasi ke luar kabupaten. Secara garis besar orientasi pemasaran Kabupaten Tolitoli yang utama adalah ke Kota Palu. Jenis barang produksi yang dipasarkan berupa produk pertanian, baik dalam bentuk bahan mentah maupun olahan seperti kelapa, cengkeh, kopi, hasil hutan dan hasil perikanan laut.

Secara umum sistem kota-kota berdasarkan kutub-kutub pertumbuhan dan sistem orientasi koleksi dan distribusi barang dan jasa di Kabupaten Tolitoli dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kota Tolitoli dan Lalos merupakan kota hirarki I dalam struktur pertumbuhan dan orientasi ekonomi wilayah;
- b. Kota Tinabogan, Ogotua dan Bangkir pada hirarki II;
- c. Kota Laulalang berada pada hirarki III.

Berdasarkan peringkat fungsi orientasi sistem kota-kota tersebut, maka sistem orientasi ekonomi kota-kota Kabupaten Tolitoli diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1. Pemantauan Penggunaan Lahan di Kabupaten Tolitoli Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001 – 2004

No.	Fungsi Penggunaan Lahan (Kawasan)	Tahun		Penyimpangan	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	
		2004 (*)	RTRW 2001-2004*			
		Luas (Ha)	Luas (Ha)			
1	Permukiman	2.939,62	4.787,63	1.848,01	38,60	Sesuai
2	Pertanian	18.206,47	34.619,50	16.413,03	47,41	Sesuai
3	Perkebunan	48.684,60	47.795,00	-889,60	-1,86	Sesuai
4	Alang-Alang	1.112,31	1.740,87	628,56	36,11	Sesuai
5	Hutan, Rawa & Lainnya	220.878,00	319.034,00	98.156,00	30,77	Sesuai
<b>Jumlah Total</b>		<b>291.821,00</b>	<b>407.977,00</b>	<b>116.156,00</b>	<b>28,47</b>	<b>Sesuai</b>

Sumber : (\*) Hasil Survey, 2004 dan \* Hasil Analisis RTRW Kab. Tolitoli 2001-2004

Tabel 2. Rencana Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Tolitoli Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air Minum (liter/hari)		Penyimpangan	
		Tahun		Liter/hari	%
		2004(*)	2001-2004*		
1	Tolitoli Utara	2.732.160	2.622.120	-110.040	-4,20
2	Galang	3.463.200	3.472.920	9.720	0,28
3	Baolan	6.595.320	7.779.120**	1.183.800**	15,22
3.1	Lampasio	1.460.040	-	-	-
4	Dondo	2.387.160	5.167.680***	2.780.520***	53,81
4.1	Ogodeide	1.292.400	-	-	-
4.2	Basidondo	1.131.240	-	-	-
5	Dampal Utara	1.454.640	1.745.520	290.880	16,66
6	Dampal Selatan	2.353.320	2.542.320	189.000	7,43
	Jumlah	22.869.480	23.329.680	460.200	1,97

Sumber : (\*) Hasil Survey, 2004 dan \* Hasil Analisis RTRW Kab. Tolitoli 2001-2004

\*\* Kecamatan Baolan belum pisah dengan Kecamatan Lampasio

\*\*\* Kecamatan Dondo belum pisah dengan Kecamatan Ogodeide & Basidondo

- a) Kota Hirarki I, yaitu Kota Tolitoli dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan wilayah Kabupaten Tolitoli;
- b) Kota Hirarki II, yaitu Kota Tinabogan, Lalos, dan Kota Bangkir yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Sub Wilayah Pembangunan (SWP) Kabupaten Tolitoli;
- c) Hirarki III, yaitu Kota Ogotua dan Kota Laulalang yang berfungsi sebagai kota penyangga (*hinterland*).

Sesuai hasil pemantauan dan survey lapangan, kondisi-kondisi hirarki ini terlihat masih cukup ideal untuk terus dikembangkan. Namun yang perlu diperhatikan adalah telah terjadinya pemekaran daerah Kabupaten Tolitoli yang pada saat penyusunan produk RTRW ini masih terdapat 6 (enam) kecamatan, sementara saat pelaksanaan evaluasi dan pemantauan ini wilayah tersebut telah terjadi pemekaran menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Sehingga reorientasi terhadap sistem kota-kota dan pusat pelayanan ini perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan pemekaran yang telah dilakukan.

#### ▪ Sistem prasarana dasar

Pembangunan jaringan jalan di Kabupaten Tolitoli yang mencakup program peningkatan, pemeliharaan/rehabilitasi antara lain jalan arteri, lokal dan jalan lingkungan difungsikan untuk memperlancar hubungan antar propinsi, kabupaten dan kelurahan dibidang ekonomi maupun sosial budaya. Berdasarkan data eksisting tahun 2004, jaringan jalan di Kabupaten Tolitoli menunjukkan jaringan jalan yang telah dibangun secara keseluruhan sepanjang 1.912,1 Km (3.576,44 Ha) terdiri dari : jalan arteri primer sepanjang 272 Km (652,80 ha), arteri sekunder sepanjang 1.247,8 Km (2.495,60 ha), kolektor primer sepanjang 48 Km (86,40 ha), kolektor sekunder sepanjang 21 Km (29,40 ha), jalan lokal primer sepanjang 268,0 Km (268,00 ha) dan lokal sekunder sepanjang 55,3 Km (44,24 ha). Sedangkan dari data RTRW Kabupaten Tolitoli tahun 2001-2004 tidak ada pengembangan jaringan jalan untuk semua fungsi jalan, terkecuali hanya peningkatan kualitas jaringan jalannya.

#### A. Saluran drainase dan air limbah

Berdasarkan hasil survey lapangan tahun 2004 pembangunan

saluran drainase pada umumnya belum terjadi pemerataan pembangunan saluran drainase, dimana pembangunannya masih disekitar jalan arteri primer dan belum sampai ke jalan-jalan lingkungan, sehingga diperlukan pembangunan jaringan drainase pada jalan-jalan yang belum memiliki saluran drainase.

Sementara untuk air limbah rumah tangga di sini terbagi menjadi dua yaitu air limbah aman yang dapat dibuang langsung ke saluran drainase seperti air bekas cucian, air bekas mandi, dan lain sebagainya dan air limbah yang harus melalui proses terlebih dahulu, seperti air dari wc (tinja). Khusus air limbah yang berasal dari wc dikelola melalui sistem setempat dengan pembuatan septik tank, baik yang bersifat individual oleh masyarakat maupun terbatas pada sarana dan prasarana komunal untuk umum oleh pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa secara kualitatif tidak ada penyimpangan yang cukup signifikan, hanya saja diperlukan pembangunan saluran drainase dan air limbah sebagaimana yang telah direncanakan dan diarahkan pada produk RTRW Kabupaten Tolitoli.

#### B. Jaringan air bersih

Berdasarkan dari jumlah penduduk dengan memperkirakan asumsi yang digunakan, menunjukkan kebutuhan air minum pada tahun 2004 di Kabupaten Tolitoli diperkirakan sebanyak 22.869.480 liter/hari. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Tolitoli dari tahun 2001-2004 diperkirakan sebanyak 23.329.680 liter/hari. Dari data-data di atas menunjukkan diperlukan penambahan air bersih sebanyak 460.200 liter/hari atau besar penyimpangan **1,97%**. Kebutuhan air bersih terbesar terletak pada Kecamatan Baolan, hal ini disebabkan pada daerah ini jumlah penduduknya sangat banyak, serta terpusatnya pembangunan sarana dan prasarana. Selanjutnya, kebutuhan air yang terendah terletak di Kecamatan Basidondo. Untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.

Perlu pula dikemukakan di sini bahwa Kabupaten Tolitoli telah mengalami pemekaran wilayah dari 6 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Hal ini dengan sendirinya turut mempengaruhi distribusi kebutuhan jaringan air bersihnya. Jadi, meskipun secara keseluruhan dapat terlihat hanya terjadi 1,97% penyimpangan, namun secara perwilayahan hal ini sudah menyimpang 100% atau dengan kata lain RTRW Kabupaten Tolitoli ini sudah perlu dilakukan revisi secara keseluruhan akibat pemekaran tersebut.

#### C. Jaringan listrik

Berdasarkan dari hasil survey lapangan pelayanan penduduk untuk jaringan listrik di Kabupaten Tolitoli pada umumnya sudah terlayani dan dengan menggunakan asumsi di atas, maka pada tahun 2004 kebutuhan jaringan listrik Kabupaten Tolitoli terdiri dari kegiatan rumah tangga sejumlah 5.162,400 KW, kegiatan sosial ekonomi sejumlah 1.032,480 KW, dan untuk penerangan jalan sebesar 774,360 KW. Sedangkan kebutuhan listrik menurut RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004 untuk kegiatan rumah tangga sebesar 16.951,059 KW, kegiatan sosial ekonomi sejumlah 3.390,211 KW, dan kebutuhan penerangan jalan sejumlah 2.542,658 KW. Dengan membandingkan data di atas menunjukkan diperlukan penambahan jaringan listrik sebesar 15.914,688 KW atau besar penyimpangannya adalah **69,55%**. Pada umumnya RTRW Kabupaten Tolitoli pada wilayah kecamatan yang diperuntukkan untuk jaringan listrik masih sesuai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

#### D. Jaringan telepon

Hasil survey lapangan jaringan telepon di Kabupaten Tolitoli baru melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Baolan dan Kecamatan Galang. Sudah ada sekitar 5.400 satuan sambungan baik untuk sambungan domestic, non-domestik maupun cadangan. Sedangkan dari data RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004 jumlah satuan sambungan yang dibutuhkan

sebanyak 9.418 satuan sambungan. Dengan membandingkan data di atas menunjukkan diperlukan penambahan kebutuhan jaringan telepon sebanyak 4.018 satuan sambungan atau besar penyimpangan **42,66%**. (Tabel 4).

#### E. Persampahan

Berdasarkan hasil survey lapangan untuk mengatasi pembuangan sampah organik dan non-organik baik berasal

dari permukiman, perkantoran dan perdagangan di Kabupaten Tolitoli belum disediakan sarana sampah, seperti gerobak sampah, tong sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), akibat dari pembuangan sampah lingkungan di Kabupaten Tolitoli akan tercemar. Saat ini penduduk umumnya masih menggunakan sistem pembakaran.

Tabel 3. Kebutuhan Jaringan Listrik Kabupaten Tolitoli Tahun 2004 dan RTRW 2001 – 2004

No.	Kebutuhan Listrik	Kebutuhan Listrik (Tahun 2004*)	Kebutuhan Listrik (Tahun 2001 - 2004*)	Penyimpangan	
		KW	KW	KW	%
1	Rumah Tangga (RT)	5.162,400	16.951,059	11.788,659	69,55
2	Kegiatan Sosial Ekonomi	1.032,480	3.390,211	2.357,731	69,55
3	Penerangan Jalan	774,360	2.542,658	1.768,298	69,55
	Jumlah	6.969,240	22.883,928	15.914,688	69,55

Sumber : (\*) Hasil Survey, 2004 dan \* Hasil Analisis RTRW Kab. Tolitoli 2001-2004

Tabel 4. Rencana Kebutuhan Sambungan Telepon di Kab. Tolitoli Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001 – 2004

No.	Jenis Sambungan	Kebutuhan Sambungan Telepon		Penyimpangan	
		Tahun		Sataun Sambungan	%
		2004(*)	2001-2004 *		
1	Domestik	2.400	4.186	1.786	42,67
2	Non-domestik	2.880	5.023	2.143	42,67
3	Cadangan	120	209	89	42,58
	Jumlah	5.400	9.418	4.018	42,66

Sumber : (\*) Hasil Survey, 2004 dan \* Hasil Analisis RTRW Kab. Tolitoli 2001-2004

Tabel 5. Perkiraan Volume Sampah di Kabupaten Tolitoli 2004 dan RTRW 2001 – 2004

No.	Sumber Sampah	Volume Sampah		Penyimpangan	
		2004(*)	2001-2004*	Volume (liter/jiwa/hari)	%
1	Rumah Tangga (1,40 liter/jiwa/hari)	266.810,600	272.179,600	5.369,000	1,97
2	Perdagangan (0,50 liter/jiwa/hari)	95.289,500	97.207,000	1.917,500	1,97
3	Institusi (0,30 liter/jiwa/hari)	57.173,700	58.324,200	1.150,500	1,97
	Jumlah	419.273,800	427.710,800	8.437,000	1,97

Sumber : (\*) Hasil Survey, 2004 dan \* Hasil Analisis RTRW Kab. Tolitoli 2001-2004

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan indikasi jumlah penduduk pada tahun 2004 diperoleh total timbunan sampah sebesar 419.273,800 liter/jiwa/hari yang terdiri dari sampah rumah tangga, perdagangan, dan industri. Dari hasil RTRW Kabupaten Tolitoli tahun 2001- 2004 total timbunan sampah sebesar 427.710,800 liter/jiwa/hari. Jadi terlihat adanya selisih volume sampah yang diperkirakan dalam perencanaan RTRW tersebut dengan angka penyimpangan sebesar 1,97%. (lihat Tabel 5).

▪ Sarana/ fasilitas lingkungan

A. Fasilitas pendidikan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa di daerah Kabupaten Tolitoli terdapat kekurangan fasilitas pendidikan berupa Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 176 unit dengan luas lahan 21,12 Ha dan SLTA sejumlah 24 unit dengan luas 12 Ha. Sementara untuk fasilitas pendidikan lainnya telah terjadi kelebihan kebutuhan dari perencanaan menurut RTRW Kabupaten Tolitoli dan standar kebutuhan fasilitas pendidikan dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, seperti SD telah lebih sebanyak 256 unit, SLTP lebih sebanyak 20 unit, dan Perguruan Tinggi (PT) atau sedrajat. Kelebihan ini kemungkinan disebabkan oleh kondisi geografis wilayah ini.

Secara umum, peruntukkan fasilitas pendidikan telah mengalami kelebihan sebanyak 81 unit dengan total luas lahan 69,04 ha atau mengalami penyimpangan sebesar - **63,74%** dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004.

B. Fasilitas peribadatan

Di daerah Kabupaten Tolitoli terjadi kelebihan untuk semua fasilitas peribadatan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk terhadap standar kebutuhan fasilitas peribadatan tersebut.

Secara umum, peruntukkan fasilitas peribadatan telah mengalami kelebihan sebanyak 279 buah dengan total luas lahan 47,524 Ha atau

mengalami penyimpangan sebesar - **790,02%** dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004.

C. Fasilitas kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat kekurangan fasilitas kesehatan berupa BKIA sejumlah 17 unit dengan luas lahan 0,85 Ha, Apotik sejumlah 15 unit dengan luas 0,53 Ha, Puskesmas sebanyak 13 unit dengan luas 0,46 Ha, dan Praktek Dokter sejumlah 30 unit dengan luas 0,45 Ha. Sementara untuk fasilitas kesehatan lainnya telah terjadi kelebihan kebutuhan dari perencanaan menurut RTRW Kabupaten Tolitoli dan standar kebutuhan fasilitas pendidikan dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, seperti Posyandu telah lebih sebanyak 29 unit, Rumah Sakit (RS) lebih sebanyak 1 unit, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 33 unit.

Secara umum, peruntukkan fasilitas kesehatan telah mengalami kelebihan sebanyak 12 unit dengan total luas lahan 11,19 Ha atau mengalami penyimpangan sebesar - **60,50%** dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004.

D. Fasilitas pemerintahan

Berdasarkan hasil pemantauan di Kabupaten Tolitoli terjadi kelebihan hampir semua fasilitas pemerintahan bila dibandingkan dengan jumlah penduduk terhadap standar kebutuhan fasilitas pemerintahan tersebut. Selain itu, keberadaan fasilitas pemerintahan ini juga banyak dipengaruhi oleh kondisi pemekaran wilayah yang terjadi selang kurun waktu 1 - 2 tahun terakhir, sehingga mengharuskan untuk percepatan pembangunan fasilitas-fasilitas pemerintahan seperti : kantor kecamatan, kantor desa/kelurahan, polsek, dan lain-lain.

Secara umum, peruntukkan fasilitas pemerintahan telah mengalami kelebihan sebanyak 35 unit dengan total luas lahan 2,98 Ha atau mengalami penyimpangan sebesar - **39,95%** dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004.



Tabel 6. Kebutuhan Fasilitas Perdagangan di Kabupaten Tolitoli Tahun 2004 dan RTRW Tahun 2001-2004

No.	Fasilitas Perdagangan	Tahun				Penyimpangan		
		2004(*)		2001-2004 *		Jumlah (unit)	Luas (ha)	%
		Jumlah (unit)	Luas (ha)	Jumlah (unit)	Luas (ha)			
1	Pasar	41	55.35	7	9.45	-34	-45.90	-485.71
2	Toko	727	87.24	78	9.36	-649	-77.88	-832.05
3	Kios	1412	14.12	778	7.78	-634	-6.34	-81.49
4	Warung	746	7.46	778	7.78	32	0.32	4.11
Jumlah Total		2926	164.17	1641	34.37	-1285	-129.80	-377.65

Sumber : (\*) Hasil Survey, 2004 dan \* Hasil Analisis RTRW Kab. Tolitoli 2001-2004

#### E. Fasilitas perdagangan

Secara umum, peruntukkan fasilitas perdagangan telah mengalami kelebihan sebanyak 1.285 unit dari berbagai jenis fasilitas dengan total luas lahan 129,80 Ha atau mengalami penyimpangan sebesar **-377,65%** dari yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004. Sehingga dapat dikemukakan bahwa untuk kebutuhan fasilitas perdagangan ini perlu dilakukan revisi secara menyeluruh mengingat penyimpangan yang terjadi sudah relatif besar (tabel 6).

#### F. Fasilitas ruang terbuka dan tempat rekreasi

Berdasarkan hasil survey lapangan tahun 2004, menunjukkan peruntukkan kawasan ruang terbuka (jalur hijau) untuk taman dan taman bermain belum tersedia dan untuk lokasi kawasan pariwisata terletak disekitar pantai. Sesuai hasil survey tersebut, menunjukkan jumlah dari ruang terbuka terdiri dari lapangan olah raga sebanyak 71 unit dengan luas lahan 63,90 Ha dan dari hasil RTRW Kabupaten Tolitoli 2001-2004, menunjukkan kebutuhan fasilitas ruang terbuka terdiri dari : taman sebanyak 778 unit dengan luas lahan 19,45 Ha, taman tempat bermain sebanyak 78 unit dengan luas lahan 9,75 Ha. Secara keseluruhan untuk fasilitas ruang terbuka mengalami penyimpangan sebesar **-80,00%**.

### 5. Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

- 1) Hasil pemantauan dilapangan terdapat penyimpangan yang signifikan terhadap pemanfaatan kawasan lindung, baik terhadap luas, lokasi maupun fungsi dan jenis peruntukan maupun arah pengembangannya. Untuk kawasan budidaya masih sesuai dengan hasil revisi RTRW yang ada, kendala yang dihadapi terkait dengan upaya pengendalian dan pengembangan kawasan budidaya yang telah ditetapkan. Untuk penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tolitoli mengalami penyimpangan rata-rata sebesar 28,47%. Secara rinci angka penyimpangan sampai dengan 47,41% untuk kawasan pertanian dan 38,60% untuk kawasan permukimannya.
- 2) Terhadap aspek struktur ruang wilayah untuk sistem kota/pusat pelayanan masih menggunakan sistem hirarki kota-kota sesuai skala pelayanan. Seiring dengan pemekaran yang terjadi, perlu reorientasi terhadap sistem kota-kota dan pusat pelayanan. Terhadap sistem prasarana dasar tidak ditemukan penyimpangan yang signifikan pada jaringan jalan dan drainase. Untuk pemenuhan air bersih penyimpangan rata-rata sebesar 1,97%. Kebutuhan jaringan listrik penyimpangan sangat signifikan sebesar 69,55%. Demikian pula

penyimpangan terhadap kebutuhan jaringan telepon sebesar 42,66% dan sampah sebesar 1,97%

- 3) Hasil pemantauan terhadap kebutuhan sarana/fasilitas lingkungan menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan penyimpangan melebihi target produk RTRW (sebesar -63,74%), demikian halnya dengan fasilitas peribadatan sebesar -790,02%, fasilitas kesehatan sebesar -60,50%, fasilitas pemerintahan sebesar -39,95%, fasilitas perdagangan sebesar 377,65% dan kebutuhan ruang terbuka sebesar -80,00%

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut beberapa hal yang perlu direkomendasikan diantaranya adalah melakukan perbaikan dan tatanan kembali produk RTRW yang mempunyai prosentase penyimpangan dibawah angka 20% terutama yang terkait dengan pola penggunaan lahan dan kebutuhan prasarana dan saran wilayahnya. Dengan demikian selayaknya produk RTRW ini direvisi secara total.

## 6. Daftar Pustaka

- Anonim, (1998), *Buku Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang (BP3R) di Daerah*, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Anonim (2003), *Kabupaten Tolitoli Dalam Angka 2002*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli, Tolitoli
- Anonim (2003), *Revisi Rencana Tata Ruang Kabupaten Tolitoli*, Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Tolitoli
- Bourne, L.S. et al (1971), *Internal Structure of The City, reading on space and environment*, Oxford Univesity Press, London
- Jayadinata, J.T. (1999) *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan*

*Perkotaan dan Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung

Koestoer, R.H. et al (2001) *Dimensi Keruangan Kota*, UI-Press, Jakarta

Silas, J. (2001), *Kota Masa Depan dalam Otonomi Daerah*, Makalah, ITS, Surabaya

Yunus, H.S. (1999), *Struktur Tata Ruang Kota*, Pustaka Pelajar Yogyakarta